

Dinamika Elit Gereja dalam Panggung Politik

Dynamics Church Elite on Political Stage

Deki Itje* & Laila Kholid Alfirdaus

Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

Diterima: 18 Oktober 2021; Direview: 26 Oktober 2021; Disetujui: 17 Januari 2021

*Corresponding Email: deckyice685@gmail.com

Abstrak

Gereja adalah salah satu organisasi keagamaan yang tak terlepas dari berbagai kepentingan para elit gereja dan pesta rakyat menjadi ajang kompetisi bagi para elit politik lokal. Dengan demikian, elit gereja menjadi incara para elit-politik dan akademisi yang ingin merebut kekuasaan. Kondisi ini terbukti, dalam berbagai konstelasi politik, organisasi keagamaan sarat dengan kontrak politik. Keterlibatan elit gereja dalam momentum politik ada yang mendapat dukungan dan penolakan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana para elit gereja bersaing dipanggung politik dan pandangan warga gereja terhadap elit gereja yang terlibat dalam politik. Metodologi yang digunakan kualitatif deskriptif dengan menentukan informan menggunakan teknik purposive, dimana informan ditentukan berdasarkan kapasitasnya dalam menjawab pertanyaan yang jadi titik lokus pada penelitian ini. Informan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang. Lokasi penelitian di Kabupaten Halmahera Utara. Hasil penelitian menunjukkan momentum politik terdapat perbedaan pandangan politik dan kepentingan, sehingga memberi konsekuensi pada perpecahan gereja (GMIH). Elit gereja (pendeta) dengan misi teologisnya berubah menjadi misi politik praktis, masyarakat (jemaat) di didik dengan pendidikan politik ras, suku, dan agama yang kemudian itu di anggap seakan-akan adalah sebuah kebenaran yang harus di terima oleh semua lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Elit; Gereja; Politik; Politik Praktis

Abstract

The church is an organizational organization that takes the interests of various church elites and parties to become a competition arena for local political elites. Thus, the elite church became the target of political elites and academics who wanted to seize power. This condition is evident, in various political constellations, religious organizations are laden with political contracts. Involve church elites in political momentum, there is support and response. This research explains how church elites compete on the political front and the views of church members of the church involved in politics. The methodology used is descriptive qualitative by determining informants using a purposive technique, in which the informants are determined based on their capacity to answer questions that are the locus of this study. The informants in the study were 13 people. The research location is in North Halmahera Regency. The results of the research show that political momentum contains political views and interests, thus giving permission to the church split (GMIH). The church elite (pastor) with its theological mission transformed into a practical political mission, the community (congregation) was educated with the political education of race, ethnicity, and religion which was then considered as the truth that all levels of society must accept.

Keywords: Elite; Church; Politics; Practical Politics

How to Cite: Itje, D. & Alfirdaus, L.K. (2021). Dinamika Elit Gereja Dalam Panggung Politik. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3(3): 796-806.



PENDAHULUAN

Budaya politik di Halmahera Utara memiliki ciri khas yang ditandai dengan otoritas gereja merupakan sebuah syarat mutlak bagi para aktor atau rezim politik untuk berkuasa. Gereja yang umumnya bersifat apolitis, namun sebagian warga GMIH (Gereja Masehi Injili Halmahera) berasumsi bahwa GMIH tidak lagi apolitis karena dengan terang-terang para elit gereja menyatakan sikap untuk mendukung salah satu calon yang ikut dalam kontestasi Pilkada. Sehingga menimbulkan banyak persepsi di kalangan elit gereja dan warga gereja itu sendiri. Ketidakpercayaan warga GMIH pada para tokoh politik yang dinilai "kotor" yang kemudian menyebabkan pemikiran bahwa elit gereja harus mempunyai sikap politik secara terang-benderang untuk mendukung salah satu kandidat (calon).

Warga Kristen, banyak yang beranggapan bahwa gereja dan politik seperti campuran air dan minyak. Menurut Banjo, (2013), dalam konteks Indonesia, gereja dan politik keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri karena saling membutuhkan dan melengkapi. Artinya secara kelembagaan gereja dapat membentuk iman seseorang dengan moral dan etika dapat terbentuk melalui mimbar agama. Sementara Politik memberi pengertian bahwa, melalui mobilisasi massa dan orasi politik seseorang dapat menyalurkan nilai-nilai kebaikan untuk membangun bangsa demi kemaslahatan dan kepentingan bersama warga negara (Nasution, 2020).

Elit memainkan peran-peran politik lewat gereja sebagai modal utama untuk memperoleh legitimasi awal yang kemudian berhasil dikonversi menjadi kekuasaan politik tingkat lokal. Temuan Malensang, (2016) tentang kekuasaan Penatua dalam politik lokal di Minahasa, Gereja sebagai konstitusi keagamaan dijadikan sebagai instrumen kekuasaan politik lokal. Melalui jabatan penatua (pelayan khusus), mampu meloloskan untuk berkuasa dengan bersaing dalam merebut jabatan politik di tingkat lokal. Penatua memiliki peranan penting dalam mendukung aktor dan merubah persepsi umat terhadap aktor yang memiliki relasi kuasa untuk mempengaruhi kepentingan.

Momentum agenda politik Pemilihan Kepala Daerah di setiap Kabupaten dan Kota yang akan berlangsung di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk di Halmahera Utara. Aktor politik akan melakukan berbagai upaya untuk menarik simpati masyarakat dengan banyak strategi (Harahap, 2019). Gereja bukan berafiliasi dengan partai politik, atau bahkan terlibat secara langsung dalam politik praktis. Tetapi mempersiapkan umatnya menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan politik bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Gereja memandang negara sebagai persekutuan hidup yang mempunyai keterikatan. Sehingga perlu disadari bahwa setiap warga gereja diutus ke dunia politik. Gereja pun harus mengutus warga jemaatnya sebagai wakil gereja dalam pemerintahan sebagai wujud pelayanannya bagi masyarakat.

Pengutusan ini diibaratkan seperti domba yang di utus ke tengah-tengah serigala, maka dituntut pula agar warga jemaat hendaknya cerdas seperti ular tetapi tetap tulus seperti merpati. Dalam negara demokrasi berlaku dua prinsip yakni tiap-tiap orang adalah penting dan keanggotaan adalah partisipasi (Thamrin et al., 2020). Prinsip ini merupakan embrio praktik politik praktis yang menempatkan sesama warga sebagai pemeran dalam pembangunan dimana di dalamnya gereja berperan sebagai katalisator dalam menerjemahkan dan bahkan menjadi bagian dari politik itu sendiri. Oleh sebab itu, mencermati tentang bagaimana pandangan warga terhadap elit gereja yang terlibat dalam politik dan Bagaimana elit gereja bersaing bersaing dalam panggung politik penting untuk dicermati.

Penelitian terdahulu, telah banyak melakukan analisis terhadap keterlibatan elit agama dalam panggung politik. Akan tetapi, politisasi agama di Pemilihan Umum masih menjadi masalah krusial. Fenomena tersebut, merupakan salah satu ciri ilmu sosial yang sangat dinamis dan terus berkembang. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi yaitu Faiz Albar menunjukkan patronasi ulama mempengaruhi partisipasi pemilih pada Pilgub Sumut Tahun 2018 di Kota Medan (Nasution, 2019). Selain itu, Pilkada DKI Jakarta 2017 berkaitan dengan terbentuknya identitas dan keterbelahan sosial antara imajinasi politik Islam, sehingga



menghasilkan preferensi pilihan dalam demokrasi elektoral (Prayogi, 2019). Lebih lanjut, Faridah membuktikan politisasi agama telah dijadikan kampanye hitam untuk mempengaruhi pemahaman seseorang dan berupaya memasukkan kepentingan kedalam sebuah agenda politik (Faridah, 2018).

Penelitian Supriyadi memperlihatkan isu SARA dalam Pilkada tidak mendapatkan respon positif dari pemilih rasional. Sebab Pemilih rasional lebih melihat masalah publik dan mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya (Supriyadi, 2015). Tambahan lagi, studi kurniawan pada Pemilu 2019 menunjukkan politisasi agama tidak baik untuk perkembangan demokrasi di Indonesia (Kurniawan, 2018). Penelitian dalam tulisan ini mengambil posisi yang berbeda dalam beberapa masalah dengan penelitian sebelumnya, sebab berfokus pada dinamika elite Gereja Masehi Injili Halmahera dalam panggung politik. Kelebihan penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada penelitian terdahulu untuk sebagai referensi dalam dunia akademik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, dan observasi. Menurut Creswell, (2012) dalam penelitian kualitatif terdapat penelitian studi kasus yang digunakan peneliti dalam menganalisis topik tersebut. Penelitian ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan secara cermat tentang Elit Gereja Dalam Panggung Politik di Kabupaten Halmahera Utara. Lokasi Penelitian di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Informan dalam penelitian ini terdiri, Bupati Halmahera Utara Ir Frans Manerry sebagai Ketua IV BPHS GMIH, Demianus Ice, M.Th Ketua Umum GMIH. Abner Nones Ketua Yayasan Kristen GMIH, Pendeta Meiyane Mahura, S.Th Senior GMKI, Yustus Taarungan tokoh masyarakat (warga jemaat) di Jemaat Cocatu Ino Kusuri., Imanuel Sale S.Th yang juga sebagai Ketua Umum Pemuda GMIH, Jerizal Pertrus akademisi, Alpres Juana, Heson Keradjaan, Susi Stella Frans, Hein Namotemo, Djidon Hangewa, MS Ketua Yayasan Perguruan Kristen Halmahera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Elit gereja Dalam Politik Praktis

Perkembangan sekarang istilah politik lebih mengarah kepada gerakan praktis yang menunjukkan real politik, sebagai kepentingan praktis atau yang berbasis pada kekuasaan. Sasaran yang hendak dicapai adalah tercapainya kepentingan pribadi, kelompok, golongan atau negara, dan mendapatkan kekuasaan. Menurut Deliar (1983) politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Menyitir pendapat tersebut, hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa aktivitas, ataupun sikap yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan (Nasution, 2019).

Politik dipahami secara ilmiah, tidak melulu bermakna sebagai real politik yang di bangun atas kepentingan praktis. Sebab selain politik praktis, ada politik yang berbasis moral dan ideologi. Artinya hal paling dasar, politik sesungguhnya tentang bagaimana membawa kebaikan bagi komunitas dalam mana berpolitik dilakukan. Dalam tataran makna politik, posisi gereja akan terlibat dalam politik. Institusi-institusi politik yang menjadi kendaraan orang dalam berpolitik bukanlah lembaga yang bebas dari kepentingan. Lembaga-lembaga politik itu memiliki agenda dan kepentingan politiknya sendiri. Setelah berada didalamnya visi dan pandangan pribadi diselaraskan dengan tujuan dan kepentingan pragmatis partai politik. Disinilah anggota-anggota gereja tidak bisa berbuat sekehendak seperti yang dibayangkan. Sebagai lembaga yang berdiri bukan untuk mengejar kekuasaan atau kepentingan politis dan ekonomis tertentu, gereja dapat berbuat sesuatu secara lebih leluasa. Keterkaitan agama dengan politik, menurut kelompok ini, lebih pada peran agama dalam high politic (politik tinggi), yang diwujudkan melalui upaya menegakkan nilai-nilai universal agama di dalam masyarakat, seperti nilai keadilan, kemanusiaan dan tegaknya supremasi hukum dalam sistem politik apapun (Halim, 2014).

Politik praktis, tidak bisa dilepaskan dari dua unsur penting, yakni kuasa dan hukum. Pemerintah yang tidak mempunyai kuasa, tidak dapat memerintah atau menata kehidupan masyarakat dan negara. Tetapi pemerintah yang memerintah semata-mata berdasarkan kuasa, ia akan menciptakan pemerintahan otokratis atau diktator. Dalam bernegara, kekuasaan telah dipisahkan dan dibagikan kepada tiga badan diantaranya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga badan tersebut mempunyai kuasa untuk memerintah (eksekutif), kuasa untuk membuat undang-undang (legislatif), dan kuasa kehakiman (yudikatif). Distribusi kekuasaan sesuai peran politik dalam tiga badan tersebut menjamin kestabilan negara. Menurut Informan Frans Manerry kehidupan politik praktis tidak bisa dihindarkan karena menyangkut kepentingan agama dan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai warga negara Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak boleh alergi dengan kehidupan politik yang walaupun serba-serbi prakteknya mempertontonkan praktik – praktik yang tidak bertanggung jawab. Daerah ini membutuhkan peran aktif Tetua gereja (elit gereja) tidak hanya melalui Organisasi Gereja tetapi lebih daripada itu yaitu, hadir dengan memberikan pikiran dan ide-ide cemerlang secara paripurna untuk mengatur kehidupan bersama melalui institusi-institusi negara”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, negara memberi ruang dan membutuhkan peran aktif organisasi gereja dengan melibatkan anggota untuk terlibat aktif dalam bidang politik. Elit gereja dituntut mengambil peran dalam pesta demokrasi untuk mewakili peran gereja secara khusus dan peran masyarakat Halmaera umumnya yang didalamnya berperan dalam pengambilan keputusan dalam banyak kepentingan. Menurut Informan Frans Manerry politik berperan dalam menata menata persekutuan hidup bersama, yang didalamnya ada kuasa dan hukum.

Tugas dan peran elit gereja yang terjun ke dalam dunia politik dimaksudkan untuk mencegah kecenderungan menyalahgunakan kuasa atau memonopoli kuasa, baik kuasa politik, ekonomi, atau kuasa yang lainnya. Menurut informan Abner Nones menyebut menjelang pemilu antusiasme masyarakat Halmaera Utara sangat tinggi yang ditandai dengan banyak melibatkan dalam kegiatan politik (sosialisasi, mencalonkan diri, dan kampanye) termasuk elit gereja.

“Pemilihan Legislatif (2004-2009 dan 2009-2014), di Halmaera Utara tercatat dan terdaftar sebagai Calon dan Anggota DPRD terpilih, 70% dari kalangan warga gereja. Saya dan beberapa warga gereja lainnya termasuk teman-teman Pendeta, di angkat dan dipilih oleh masyarakat dan jemaat untuk menjadi wakil Allah di lembaga pemerintah yang berlabel wakil rakyat (lembaga DPRD) agar menjadi penyambung aspirasi jemaat”

Kesadaran politik yang tinggi dikalangan elit gereja tidak terlepas dari lembaga keagamaan yang menanamkan peran di dunia politik yang nantinya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar keterlibatan elit politik dalam pesta demokrasi. Minimnya pemahaman tersebut menyebabkan terjadinya penghindaran dan penolakan umat kristen untuk melibatkan diri di wilayah politik praktis yang ‘duniawi’, sehingga minimnya keterlibatan politisi kristen yang berkualitas di Indonesia. Tantangan utama gereja mengatasi permasalahan internal terutama tentang kesiapan sumber daya manusia. Secara doktrinal, terdapat arus prokontra antara gereja yang terlibat dan gereja yang steril dari dunia politik, sosial dan ekonomi. Menurut informan Abner Nones mengatakan ada penolakan kalangan tertentu dari teolog yang menolak kegiatan pelatihan sosial dengan alasan soal-soal duniawi (politik, ekonomi, sosial, dan hal-hal sejenisnya) sudah ada yang mengurusnya. Permasalahan ini yang menjadi kendala sulitnya mendapatkan SDM berkualitas dalam politik. Pandangan Gereja hanya bertugas dan didesak untuk memikirkan urusan surga masih menjadi pandangan umum yang berkembang dikalangan masyarakat. Politik masih dianggap sebagai kepentingan duniawi, sehingga memunculkan keresahan yang dapat merusak kewibawaan dan peran gereja. Pandangan tersebut memunculkan gerakan berkembang untuk melindungi kepentingan agama.

Menurut Informan Meiyane Mahura seorang pendeta yang pernah terlibat dalam politik praktis, menyebut adanya apriori dan stigmatisasi terhadap politik ini telah mengakibatkan terjadinya perjalanan mundur umat kristen di Indonesia. Tak terlepas dikalangan warga GMIH



yang tak sedikit pula hingga kini dengan terang-terangan menolak elit gereja untuk masuk dalam wilayah politik praktis. Dampaknya lahirnya produk hukum yang mengatur kepentingan diluar kepentingan gereja.

“Warga GMIH selama ini hidup dalam kesadaran palsu. Sebab, jika Pendeta bicara soal politik diluar mimbar gereja, atau sebagian jemaat berbicara tentang politik melalui mimbar gereja, terjadi penolakan oleh sebagian jemaat berstigma bahwa politik tidak boleh diadukan dengan urusan gereja. Bagaimana warga gereja dapat bisa bersaing dengan skill yang berkompeten di bidang politik kalau warga gereja takut bicara tentang politik?. Daerah ini membutuhkan peran warga gereja tidak hanya dari luar mimbar gereja, tetapi justru melalui mimbar gereja akan melahirkan Doa serta upaya menopang dan mendorong lahirnya kader-kader gereja secara kuantitatif dan kualitatif yang dapat berkarya untuk menghadirkan syalom Allah dibumi, termasuk bidang politik itu sendiri”

Warga gereja cenderung apatis dalam membicarakan politik dalam kehidupan yang membuat sebagian besar warga GMIH hanya menjadi penonton dalam panggung politik, dan belum mampu menjadi aktor-aktor profesional yang ikut bersaing di bidang politik baik di pusat maupun di daerah. Hal semacam ini, perlu peran aktif gereja dalam bidang politik, atau gereja perlu merumuskan kembali soal pandangan teologis gereja yang telah banyak menimbulkan perbedaan tafsiran oleh para teolog itu sendiri. Kenyataan bawah tugas elit gereja adalah melakukan politik agama, bukan politisasi agama. Politik agama adalah politik kenabian (*prophetic politics*) bukan politik partisan (*partisan politics*). Politik agama adalah politik moral yang mengeluarkan suara kenabian termasuk melakukan kritik kepada pemerintah dan pejabat publik yang berkuasa, yang tidak menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab. Politik kenabian atau gerakan moral agama adalah perjuangan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Gerakan kebangkitan (kebangunan) spiritual selalu bersamaan dengan gerakan menegakkan keadilan social (*social justice movements*). Peran tersebut yang harusnya terus ditanam agar masyarakat tidak menganggap politik sebagai urusan dunia yang terbebas dari ajaran agama.

Sementara itu, pengetahuan sosial merupakan instrumen dasar manusia untuk membentuk sikap, perilaku, dan nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Menytir Petit menjelaskan Politik sebagai ragam kegiatan di dalam sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan - tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan tersebut (Rahmadi, 2016:2). Sangat relevan dikatakan Aristoteles dan Petit, Diperlukanlah pengetahuan para elit gereja tentang persaingan politik tetapi bukan demam politik. Dalam artian, jika ada yang ingin terjun langsung menekuni profesi sebagai politisi, sah-sah saja. Yang perlu diperdebatkan adalah bukan boleh tidaknya elit gereja masuk kekuasaan (dunia politik) melainkan mampu dan tidaknya mereka dalam memberikan nilai-nilai kebaikan dalam tatanan sosial melalui tugas dan bertanggung jawab, jika ikut berkompetisi di dunia politik kekuasaan yang profan dan korup itu.

Dinamika dan Respon Jemaat Terhadap Keterlibatan Elit Gereja Dalam Politik

Persaingan antar elit gerja menimbulkan berbagai respon dalam internal elit dan masyarakat Halmaera Utara. Upaya mendapatkan pengaruh tersebut menimbulkan polemik yang memecah masyarakat dengan mempertaruhkan segalanya. Menurut informan Alpres Juana ada ketidaknyamana yang ditimbulkan dari praktek politik. Ada alegri politik yang ditanamkan secara terus menerus. Anggapan politik itu kotor dan jahat, tabu untuk dimasuki oleh gereja. Itulah yang sering terdengar pada kalangan jemaat di GMIH. Anggapan itu bisa dipahami yang tidak bisa dipisahkan dalam praktik didunia politik yang jarang mengabaikan moral dan etika.

“Saya pernah ada dalam lingkaran kekuasaan yang secara tidak langsung diikat dengan sistem partai, kemudian saya pun tidak banyak memiliki hak bicara dalam politik praktis. Wajar jika orang menganggap politik itu kotor maka cenderung berada di luar arena politik. Saya memilih hijrah dari dunia politik bukan berarti melepaskan diri dari tanggungjawab politik, tetapi saya lebih memilih keluar dari lingkaran kekuasaan parpol yang tak mendidik itu. Bukan berarti tidak bisa memberikan edukasi politik, akan tetapi dapat lebih leluasa memberikan edukasi politik Alkitabiah di mimbar gereja atau di luar mimbar politik”

Pernyataan tersebut menunjukkan, ada benarnya bahwa politik itu kotor maka tabu untuk dimasuki oleh para elit gereja (pelayan khusus/pendeta dan penatua) yang berkutik dengan kehidupan politik, sehingga memunculkan pandangan lebih baik fokus pada tugas kepelayanannya dan tidak diadukan dengan persoalan politik praktis. Terjun ke dunia politik harus memiliki kemampuan politik, sehingga tidak terjebak pada lingkaran kekuasaan politik, etika dan moral tetap terjaga dari intrik-intrik kekuasaan.

Kegiatan politik tidak terlepas dari orang yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi. Pejabat publik yang berasal dari elit gereja di Halmahera Utara tak sedikit yang bermental atau berjiwa *oportunis* dengan memanfaatkan kesempatan demi kepentingan pribadi. Orang yang bermental dan atau berjiwa *oportunis*, adalah orang-orang yang pandai mencari dan mencuri kesempatan untuk diri sendiri. Menurut informan Yustus Taarungan tipe macam itu tidak mengenal kata malu dalam mengejar kesempatan demi keinginan, ambisi serta popularitas dirinya untuk tujuan politik.

"Contoh dari salah satu Pimpinan Jemaat kita (Cocatu Ino) yang kala itu di usia yang masih sangat mudah sebagai pelayan khusus (pendeta), harusnya fokus pada tugas kependetaannya. Nyatanya, di tahun 2013 ambisi yang berlebihan akhir pendeta tersebut meminta dukungan ke warga jemaat agar merestui dirinya ikut berkompetisi dalam pertarungan legislatif di tahun 2014. Kita (jemaat cocatu ini) sudah putuskan dalam rapat sisi jemaat bahwa setiap pendeta yang bertugas di jemaat cocatu ino kusuri, tidak boleh untuk ikut terlibat dalam politik praktis. Keputusan ini juga bukan sewenang-wenangnya, tetapi ini bentuk penerapan aturan gereja tingkat Sinode. Terjadi pro kontak di jemaat sehingga jemaat pun ikut berkonflik atas perpecahan di tubuh GMI), mereka harusnya jadi contoh dalam menjaga keberagaman dan keutuhan jemaat, tapi akhirnya jemaat yang dikorbankan dari ambisiusnya para elit gereja itu sendiri"

Pro kontra dukungan terus bergulir dilingkungan internal yang menimbulkan berbeda pandangan. Tidak sedikit warga gereja yang tegas menolak para pelayan khusus (pendeta) terjun dalam dunia politik dengan memanfaatkan keberadaan jemaat demi ambisi kekuasaan. Keberadaan jemaat selalu menjadi pundi-pundi (galangan suara) bagi mereka yang ingin terjun ke dunia politik. Kondisi jemaat yang dalam goncangan (dualisme kepemimpinan) pun acapkali menjadi sasaran untuk dicuri oleh mereka yang demi menjawab keinginan untuk duduk di lembaga legislatif. Menurut informan Susi Stella Frans menganggap pendeta memiliki tanggung jawab agama yang besar, namun disisi lain hak politik pendeta harus tersalurkan. Pandangan ini yang menjadi persoalan yang berlanjut.

"Hak individual seorang pendeta setara dengan orang lain (warga jemaat), ia juga berhak menyatakan diri (mencalonkan diri di lembaga eksekutif/legislatif) yang kemudian ikut bertarung dalam pesta demokrasi. Warga gereja tidak boleh membatasi hak seseorang, sebab negara menjamin dan memberi ruang bagi setiap warga negara. Memang menjadi titik krusial jika seorang pendeta terlibat dalam politik praktis. Maka, kembali kepribadi seorang pendeta dan sangat dianjurkan agar seorang pendeta untuk mendengarkan hati nuraninya jikalau memutuskan untuk menjadi politikus dan atau tidak menjadi politikus, dan itu patut di hormati"

Ada semacam garis pembatas antara warga jemaat ketika pendeta terjun dalam dunia politik praktis. Jika seorang pendeta memutuskan untuk menjadi politisi, mestinya mempertimbangkan dengan seksama kerugian dan keuntungannya bagi warga jemaat dan masyarakat. Pendeta mestinya tidak perlu dilematis dan harus konsisten mengambil keputusan, karena tidak akan mungkin dapat menggabungkan antara tugas pelayanan dan tugas-tugas seorang politisi. Komitmen ini yang diharapkan bagi pendeta yang terjun ke dunia politik.

Menurut Heson Keradjaan, kedewasaan semua pihak (pendeta dan warga-warga jemaat) untuk melihat tugas politik sebagai panggilan gereja sangat diharapkan. Warga gereja (pendeta dan jemaat) harus hadir memberikan edukasi politik sebagai wujud pemahaman politik yang baik. Jangan sampai keterlibatan pendeta dalam bidang politik dianggap sebagai sebuah penyimpangan yang harus diberi sanksi. Politik jangan disamakan dengan manajemen kepentingan kelompok



tertentu dan ruang publik jangan direduksi menjadi ruang privat. Kebebasan harus diartikan sebagai tindakan menyikapi diri untuk memulai sesuatu dan mengatur kepentingan banyak orang.

“Ingatan sosial (jemaat) pasca konflik kepentingan politik dalam tubuh GMIH menuntut kita untuk memberi makna, memverifikasi hipotesa, membangun kembali tatanan dan makna kerukunan menggereja dengan melihat masa lalu. Warga Gereja harus memahami bahwa Pilkada adalah pesta kita bersama. Namanya juga pesta mestinya kita menyambut dan bergembira bersama dan tidak membawa pada suatu perpecahan”

Dari pernyataan tersebut menunjukan bahwa, sebagian kita (warga GMIH) belum seutuhnya memahami makna dan hakekat politik. Momentum politik telah membentuk arus perpecahan bagi tubuh GMIH, dalam momentum pesta rakyat kedepan, kita (warga GMIH) perlu menghidupkan ingatan seluruh warga GMIH untuk membangun bersama proyek perdamaian dan berusaha agar tidak mengulangi kekeliruan dan kesalahan pada masa lampau. Hal tersebut senada dengan informan Jerizal Pertrus yang mengatakan warga GMIH yang tanpa ingatan sosial adalah warga GMIH yang tanpa masa depan. Upaya menata kembali tidak hanya meluruskan fenomena masa lalu, tetapi juga harus diarahkan untuk menata kembali infrakstruktur ingatan jemaat. Hukum kontekstual teologia dalam tubuh GMIH harus di akui dan diterapkan, seluruh warga GMIH (pendeta, penatua, diaken, dan jemaat) harus menetapkan dan mengakui adanya pelaku kejahatan politik dalam tubuh GMIH, keadilan harus ditegakkan, sanksi hukum (hukuman moral) terhadap pelaku kejahatan politik terstruktur harus diberikan.

“Seluruh Pegawai Organik Gereja (POG) di tingkat Sinode hingga ke Jemaat harus taat azas, sistem bernegara kita di ikat dengan peraturan dan perundang-undangan, tak terlepas GMIH sebagai organisasi keagamaan juga mempunyai aturan, sebagaimana diatur dalam AD dan ART Gereja, bahkan GMIH punya struktur organisasi gereja yang membidangi Hukum (Biro Hukum GMIH) yang tugasnya melindungi dan memberi sanksi hukum bagi setiap POG yang melakukan tindakan penyalagunaan wewenang tanpa terkecuali”

Dari penjelasan tersebut memberi pemahaman bahwa, ada upaya memperbaiki akan kesalahan masa lampau untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa membangun ingatan jemaat berarti memberi pembenaran akan harapan kedepan. Harapan bahwa hari esok akan lebih baik, bahwa kekejian, kekerasan, dan ketidakadilan itu tidak akan terulang kembali. Edukasi politik yang baik akan membawa pada suatu peradaban politik yang dinamis dan santun untuk mencapai kebaikan bersama. Tentu dengan sedikit harapan, politik yang dinamis dan santun dapat menggugah dan memberi penyadaran bagi kita bersama untuk tidak melakukan tindakan kejahatan (politik kotor). Mungkin kedengarannya terlalu muluk, tetapi harapan harus tetap dibangun. Sebab bilah kita berhenti berharap, maka berakhir pula proses hidup yang kita jalani.

Persaingan dan Konflik Politik Elit Gereja

Faktor sejara persaingan di Tanah Air bukan produk pendidikan politik, tetapi produk budaya, sehingga bangsa Indonesia tidak dibentuk oleh persaingan pendidikan politik, tetapi oleh budaya politik. Gerakan politisasi agama adalah politik partisan, yang dilakukan dengan mengeksploitasi agama, menjadikan agama sebagai kendaraan politik untuk merebut kekuasaan politik dan bahkan demi meraup uang semata. Gerakan politisasi agama ini sedang laku dan marak terjadi. Politisasi agama sangat berpotensi menciptakan polarisasi dan perpecahan dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Menurut Informan Hein Namotemo elit gereja dalam lingkungan GMIH (pengurus BPHS) tidak bisa dilepaskan mentalitas feodal yang terlihat pada setiap momen Pemilu.

“Gereja Masehi Injili di Halmahera mempunyai Tata Dasar Gereja yang secara tegas menyebut Gereja secara Konstitusional tidak bisa terlibat dalam Politik praktis tidak terkecuali oleh Pengurus BPHS didalamnya. Pilkada 2015 menjadi catatan penting bagi seluruh warga GMIH, pesan singkat (via SMS) dan beredarnya “surat sakti” dari salah satu pucuk pimpinan GMIH untuk mendukung salah satu kandidat atau calon kepala daerah memberi konsekuensi bagi keberadaan seluruh jemaat dan tidak bisa tidak bagi seluruh anggota Gereja untuk patuh pada

surat sakti tersebut karena jika tidak patuh terhadap perintah maka, konsekwensi yang harus di terima adalah kehilangan jabatan, non job, atau dimutasikan ke tempat yang terpencil”

Pimpinan GMIH senantiasa memposisikan dirinya sebagai pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi, sehingga semua warga gereja, pegawai organik gereja (pendeta) harus tunduk kepadanya. Artinya, pimpinan mengarahkan untuk calon tertentu pada momen pemilihan umum, maka sudah barang tentu para pendeta dan warga gereja harus segaris dengan pimpinan yang diaktualisasi pada bentuk isi surat sakti. Praktik epistemologi penyeragaman itu mengandung cacat besar yang mengabaikan relativitas, variabel-variabel tertentu yang berpengaruh serta terlalu menggeneralisir hal-hal yang seharusnya memang tidak bisa dibuat sama begitu saja. Dampaknya hak rakyat untuk menentukan pilihan secara bebas, tanpa ada tekanan, cenderung dipaksakan. Dalam budaya yang feodal, sepertinya berkata “tidak” adalah suatu wujud dari ketidak sopanan. Sedangkan dalam situasi kekuasaan yang sedemikian memusat, berani berkata tidak berarti menunjukkan sikap perlawanan. Dalam dunia politik, mengambil sikap dan berpihak mengandung konsekuensi yang berat. Berani mengatakan sikap dengan mengatakan tidak kepada politik manipulasi, berarti menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan bukan kepada penguasa (pimpinan). Menurut Imanuel Sale masyarakat gereja harus berani mengambil sikap dan berani menunjukkan keberpihakan yang jelas. Kita harus keluar dari mentalitas feodal yang telah lama mematikan mentalitas kesadaran kritis dan telah membunuh suara-suara hati yang murni dan tulus.

“Jika tidak ada lagi keberanian dalam diri dan tidak ada lagi karakter yang kuat untuk melawan setiap ketimpangan yang terjadi di depan mata, dan lembaga yang bernafaskan keagamaan juga ikut mendorong dan mempraktekan budaya feodal maka, kita (pelayan Tuhan) gagal dalam menjalankan misi Allah pada dunia termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Jangan karena kepentingan pribadi lalu kemudian jabatan (pendeta) untuk menggadaikan hak-hak jemaat dalam momen pemilu. Kita ini (pendeta) adalah hamba Allah yang diutus untuk menghadirkan Syalom Allah bagi dunia dan masyarakat”

Pergulatan politik, terjadi perbedaan persepsi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan internal GMIH bahkan dapat disebut ada sebagian pendeta dan warga GMIH yang hidup dalam kesadaran palsu yang ditandai terpaksa memilih yang berbeda dengan keinginan pribadi. Menurut Demianus Ice gereja memperbolehkan ikut dalam dunia politik dengan alasan gereja tidak menyamakan dirinya dengan salah satu partai politik. Partai politik mempunyai ideologi dan program tersendiri begitupula gereja bicara atau bersaksi dalam dunia politik atas dasar Firman Tuhan untuk waktu tertentu. GMIH dalam menjalankan fungsinya tidak hanya melalui mimbar-mimbar agama dan atau momen-momen tertentu, namun juga secara konstitusional terus berperan aktif untuk mengawal, memecahkan, dan memberi kontribusi terhadap pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat, bangsa dan negara. Bedah hal dengan sebagian elit gereja di kalangan GMIH yang dengan wanti-wanti mengingatkan agar pendeta jangan melibatkan diri dalam dunia politik. Bahkan dengan tegas mendesak agar menggugurkan jabatan kependetaan jika yang bersangkutan kedapatan menjadi anggota partai politik.

Menurut informan Djidon Hangewa sebagai Ketua Yayasan Perguruan Kristen Halmahera ada kekawatiran apabila seorang pendeta juga merupakan anggota dan atau pengurus partai politik, sebagian elit dan warga jemaat akan menaruh kecurigaan terhadapnya sehingga dapat terjadi keretakan pada keberadaan jemaat. Bukan tidak mungkin setiap akta pelayanannya diasosiasikan dengan keanggotaan partai politik pendeta yang bersangkutan. Ada alasan yang sangat praktis pendeta itu bersungguh-sungguh dengan pelayanannya, demikian dikatan mestinya tidak ada waktu luang baginya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain, namun ada juga berpendapat lain bahwa hak politik sang pendeta tidak boleh dihalang-halangi. Pendeta berhak menyatakan diri sebagai anggota dan atau pengurus partai politik tertentu. Inilah titik krusial bagi seorang pendeta yang terlibat dalam politik praktis sehingga terjadi konflik internal pada tubuh GMIH itu sendiri.

Perlu banyak pembandahan dalam tubuh GMIH. Perbedaan pendapat para elit gereja hingga kalangan warga jemaat memberi konsekwensi bagi tubuh GMIH itu sendiri. Politik yang mestinya



dimaknai sebagai wujud kebaikan bersama tela disalah artikan dan majadi duri dalam sejarah menggereja. Tata Dasar Gereja sebagai tubuh GMIH telah diabaikan oleh para elit-elit gereja yang tidak bermoral dan beretika. Warga gereja di didik dengan praktek-praktek politik uang oleh elit gereja dan pelayan khusus (pendeta), mimbar gereja tidak lagi suci sebab sudah dirasuki oleh kepentingan politik.

Kerumitan Relasi Gereja dan Politik Praktis

Relevansi dari topik yang telah di kemukakan, barangkali Teologi Politik adalah jawaban terhadap kecenderungan berbahaya yang kian mengemuka dalam panggung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap ekstrem dari pemisahan mutlak (tidak ada urusan) antara gereja dan politik. Akibatnya, gereja yang hanya mengurus urusan-urusan formal dan ritual, tidak fungsional di satu pihak dan politik yang tanpa moral di pihak yang lain. Sikap ekstrem yang lain adalah, kolusi atau pertalian yang tidak sehat antara politik dan gereja, baik dalam bentuk peng'agama'an politik maupun pem'politik'an agama yang akibatnya adalah gereja kehilangan fungsi kritisnya, dan politik yang kehilangan keadilannya.

Sekalipun amat menekan dimensi Teologi Politik tidak mencampurbaurkan gereja dan politik. Teologi bahkan dapat mengecam dengan amat keras dan menolak dengan amat tegas perbuatan kejahatan yang terjadi pada masa lalu, ketika gereja berfungsi memberi legitimasi kepada kekuasaan politik. Bahkan secara teologi menghadihkan hakikat ilahi kepada rekan sekomplotannya itu. Sebaliknya, teologi politik mendesak gereja agar secara konsisten melaksanakan fungsi kritisnya, dengan terus menerus meletakkan situasi serta realitas politik yang ada di bawah ajaran agama. Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) adalah sala satu Organisasi Gereja di Halmahera Utara yang ikut berperan penting di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Namun, seiring dengan peran GMIH di bidang politik, sektarianisme dengan melegitimasi kekuasaan dewasa ini cenderung direduksi menjadi masalah kepentingan ekonomi (individu).

Momentum pesta demokrasi (ruang publik) hanya menjadi peluasan ruang privat, artinya perjumpaan (pemimpin) dengan yang lain akhirnya hanya untuk kepentingan dan keberhasilan diri sendiri. Orang lain (rakyat) menjadi perluasan sarana bagi para pemimpin. Hal ini memunculkan kekecewaan dan kritikan yang tidak datang hanya dari dalam tetapi juga dari berbagai kalangan masyarakat yang ada di Halmahera Utara. Kecenderungan zaman modern yang tidak memisahkan ruang publik dan ruang privat, Arendt (Haryatmoko, 2014;) memberikan kritikan tentang pembedaan kerja dan karya dipertahankan hanya oleh pembedaan ekonomi-sosial dan lingkup politik. Arendt menekan bahwa ekonomi tetap terkait dengan rumah tangga, domain privat. Upaya mengunggulkan ekonomi dengan mengorbankan politik berarti mereduksi tindakan melulu menjadi perilaku sosial karena menafikan pluralitas. Jika politik direduksi menjadi pasar, lalu politikus dianggap sebagai pengusaha dan pasar adalah politik, sedangkan pemilih adalah konsumen. Sikap ini menghapuskan pembedaan ruang publik dan ruang privat, dimana orang cenderung mencari tempat aman dalam ruang privat yang dihayati seakan-akan sudah merupakan ruang publik. Ini yang kemudian muncul kecenderungan kepada primordialisme dan sektarianisme GMIH, pengelompokan berdasarkan etnis, dan agama. Kecenderungan ini bentuk penolakan terhadap kondisi pluralitas masyarakat.

Membangun budaya politik santun berarti membangun kondisi politik yang manusiawi. Kondisi politik semacam ini, hanya mungkin apabila setidaknya memenuhi dua syarat: menghormati pluralitas dan tidak membangun ingatan sosial. Ruang publik hanya bisa tercipta apabila kita dapat bertindak bersama dalam koordinasi melalui wicara dan persuasi, bukan dengan kekerasan atau intimidasi. Dengan demikian, ruang publik sebagai sarana untuk menyingkapkan identitas seseorang. Dalam perspektif ini, politik lalu menjadi seni untuk mengendalikan diri seseorang. Politik menjadi sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Dengan demikian, keutamaan dalam politik dilihat dari kesantunan yang memungkinkan pengakuan timbal balik dan hubungan *fair* di antara para pelakunya. Namun, untuk mewujudkan kebebasan dan hubungan *fair* itu, kita harus dibebaskan dari melulu memenuhi kebutuhan biologis dan berproduksi. Sebab politik jangan

direduksi kedalam ekonomi, sehingga kebebasan hanya dipahami dalam kerangka kofrostasi dengan alam dan materi.

SIMPULAN

Pandangan politik secara umum masih terjadi prokontra dalam kalangan elit gereja, pendeta, hingga kalangan warga jemaat yang mengakibatkan pada keberagaman dan perpecahan di tubuh GMIH. Politik di anggap tabu untuk di masuki oleh para pendeta. Politik membentuk kekuasaan dan praktek politik manipulasi penggiringan massa (jemaat) menjadi kekuatiran masuknya kepentingan politik dalam lembaga keagamaan. Momentum Pemilihan Kepala Daerah mau pun Pemilihan Legislatif, terjadinya saling tarik menarik kepentingan atas dasar lembaga keagamaan untuk meraup suara yang signifikan.

GMIH sebagai lembaga keagamaan (organisasi gereja) menjadi tempat penggalangan suara, hak-hak politik warga gereja disabotase oleh para elit gereja (pendeta) atas dasar lembaga keagamaan. Upaya lembaga keagamaan untuk mendaratkan dirinya memang menghadapi tantangan berat baik secara doktrinal dan praktis, terlebih jika menilik kesiapan sumber daya manusianya. Disadari bahwa secara doktrinal, dalam tubuh GMIH terdapat arus pro kontra semacam wacana antara elit gereja yang terlibat dan elit gereja yang steril dalam dunia politik praktis. Agapan tidak menginginkan para elit gereja untuk terjun dalam dunia politik, lebih kependangan urusan politik adalah urusan duniawi sudah ada yang mengurusnya. Politik dianggap menjadi penyebab ambruknya wibawa dan peran gereja menggauli hal-hal duniawi tersebut yang menyebabkan warga GMIH terlanjur gagap politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Banjo, E. (2013). Gereja (Agama) dan Politik. *Jurnal Uniera*, 2(2), 67-79. Retrieved from <https://adoc.pub/jurnal-uniera-volume-2-nomor-2-issn-gereja-agama-dan-politik.html>
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Edisi keti). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deliar, N. (1983). *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Faridah, S. (2018). Politicization of Religion: Breaking the National Unity in Elections. *Law Research Review Quarterly*, 4(3), 489–506. <https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27023>
- Halim, A. (2014). *Politik Lokal Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Pangung)*. Lembaga Pengkajian Pembagunan Bangsa (LP2B). Yogyakarta.
- Harahap, H. I. (2019). Hate Speech In Election: Increasing Trends and Concerns. In *1st International Conference on Life, Innovation, Change and Knowledge (ICLICK 2018)* (pp. 44–46). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/iclick-18.2019.10>
- Haryatmoko. (2014). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia,.
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133–154. Retrieved from <http://202.0.92.5/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/1708/1334>
- Malensang, R. (2016). Dari Gereja Ke Pangung Politik: Studi Tentang Kekuasaan Panatua Dalam Politik Lokal Di Minahasa. *Journal Of Governance*, 1(1).
- Nasution, F. A., & Kushandajani, K. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 227–235. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3015>
- Nasution, F. A. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020: Indonesia. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 97–113. Retrieved from <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Prayogi, I. (2019). Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 31–43. Retrieved from <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/1083/653>
- Rahmadi, D. S. (2016). Peran Elit Politik Lokal Dalam Pendidikan Politik Mahasiswa Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13.
- Supriyadi, M. (2015). Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory, 1(3), 387–426. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.32>

Thamrin, M. H., Nasution, M.A., & Nasution, F. A. (2020). Problematik Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan. *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 6(2), 156–166. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.11367>

